

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekalahan penuh dan tanpa syarat yang menimpa Jepang dalam Perang Dunia II, menyebabkan negara tersebut harus memenuhi tuntutan negara-negara blok pemenang. Salah satu dari tuntutan tersebut adalah mengenai pembatasan penggunaan kekuatan militer Jepang. Atas desakan negara pemenang dan rasa bersalah pemerintah Jepang terkait keterlibatan Tokyo dalam perang, akhirnya pemerintah Jepang menyusun konstitusi baru di bawah pengawasan Amerika Serikat dan memberlakukan konstitusi tersebut, yang disebut sebagai Konstitusi Jepang 1947. Secara garis besar, isi dari konstitusi tersebut membahas mengenai perubahan peran kaisar, pengurangan kekuatan militer, perubahan kehidupan rakyat Jepang ke arah yang lebih demokratis, dan penciptaan hak-hak baru bagi perempuan. Konstitusi tersebut juga menjadi awal baru bagi Jepang dan pertahanannya. Dalam pasal 9 Konstitusi Jepang 1947 disebutkan bahwa rakyat Jepang meninggalkan perang selamanya untuk mendukung perdamaian dunia dan potensi perang, seperti angkatan laut, darat, dan udara tidak akan dipertahankan (Japan, 1946). Hal tersebut bertujuan mencegah Jepang untuk kembali menjadi kekuatan besar dengan melakukan pelemahan terhadap angkatan bersenjata dan juga untuk menahan penggunaan kekuatan militer Jepang dalam menyelesaikan konflik internasional (Ayu, 2015). Setelah pemberlakuan konstitusi tersebut, Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, dimana

Jepang mengizinkan personel dan pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya.

Perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat menjadi titik awal dimana terjalinnya aliansi di antara kedua negara. Jepang yang berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat mendapat perlindungan dan bantuan penuh dari ancaman keamanan eksternal yang dihadapi Jepang. Hal ini disebabkan setelah pendudukan Amerika Serikat di wilayah Jepang, negara tersebut tidak diperkenankan untuk mengembangkan kekuatan militer sendiri. Sebagai gantinya, dibentuk *National Safety Force* (NSF) yang merupakan gabungan dari *National Police Reserve Force* dan *Coastal Safety Force* yang menjadi cikal bakal dari *Japan Self-Defence Force* (JSDF). Secara garis besar, NSF memiliki tugas utama dalam menjaga stabilitas keamanan domestik, yang meliputi menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayah Jepang, serta mempertahankan nyawa dan harta benda dalam situasi yang berbahaya (Ken-ichi, 1997). Meski demikian, terjadi permasalahan internal dan perbedaan kepentingan di dalam pemerintahan Jepang akibat dari dibentuknya NSF. Hal ini menjadikan NSF direorganisasi oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru pada tahun 1953 dan kemudian meresmikan JSDF sebagai badan pertahanan utama Jepang.

Pada tahun 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan pernyataan mengenai rencana amandemen terhadap Konstitusi Jepang, khususnya pada Pasal 9. Revisi dilakukan oleh pemerintahan Abe untuk membentuk undang-undang yang dapat memungkinkan JSDF untuk mengambil bagian dalam pertahanan kolektif dan memerangi konflik di luar negeri (Driessens, 2022). Jepang dibawah Abe

mencoba untuk memperkuat kemampuan militer sebagai bentuk pertahanan Jepang yang mandiri, sembari melakukan pembatasan terhadap ketergantungan pada Amerika Serikat untuk keamanan wilayah Jepang.

Keputusan Abe ini tidak terlepas dari kontribusi *Liberal Democratic Party* (LDP) sebagai partai berideologi sayap kanan, sekaligus sebagai partai yang mendominasi kursi di dalam parlemen. LDP memiliki fokus kepentingan utama, yaitu berpusat pada penguatan kembali kekuatan militer nasional dan penolakan untuk diakui sebagai negara yang damai yang sepenuhnya meninggalkan perang (Mahesha, 2019). Visi partai yang ingin mengembalikan Jepang sebagai salah satu *world power*, menjadi sebuah dukungan penuh atas kebijakan yang diambil oleh Shinzo Abe yang juga ingin meningkatkan kekuatan Jepang dalam bidang militer. Kebijakan tersebut sejalan dengan fokus kepentingan partai. Terlebih lagi dengan kondisi kawasan yang mengintimidasi kedaulatan Jepang.

Permasalahan terkait keamanan di kawasan Asia Timur telah menjadi persoalan yang terus berlangsung dan menjadi pembahasan hingga saat ini. Modernisasi dan agresifitas militer yang dilakukan Cina menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang, ditambah lagi secara geografis kedua negara terletak berdekatan (Syahrin, 2018). Begitupun dengan Korea Selatan, meskipun kedua negara sama-sama menjadi aliansi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Hal ini tidak serta merta membuat kedua negara saling percaya, terlebih lagi dengan adanya konflik perebutan pulau Dokdo atau Takeshima. Selain itu, pengembangan dan uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara juga menjadi sebuah ancaman mutlak bagi keamanan Jepang.

Pengembangan dan uji coba nuklir Korea Utara telah menjadi salah satu masalah keamanan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Jepang. Pada Maret 2017, Korea Utara melakukan peluncuran hingga empat rudal balistik ke Laut Jepang dimana tiga diantaranya, menurut pemerintah Jepang, mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, sekitar 250 kilometer di sebelah barat prefektur Akita (Panda, 2017). Peluncuran tersebut tentu telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Amerika Serikat sebagai aliansi utama bagi Jepang, memberikan respon untuk siap membantu Jepang mempertahankan diri dan menggunakan seluruh kemampuan untuk melawan ancaman tersebut.

Pada tahun 2018, Korea Utara tercatat tidak melakukan aktivitas pengembangan dan uji coba rudal apapun. Namun, Korea Utara kembali melakukan uji coba di tahun 2019. Diketahui dalam kurun tahun tersebut, Pyongyang telah melakukan sebanyak 27 kali percobaan, dengan percobaan pertamanya pada tanggal 4 Mei 2019 (The Nuclear Threat Initiative, 2023). Namun, pada tanggal 2 Oktober 2019, Korea Utara meluncurkan proyektil yang diduga dari kapal selam dan kemudian jatuh dalam Zona Ekonomi Eksklusif Jepang, sekitar 350 km sebelah utara kepulauan Oki di Shimane (Kyodo News, 2019). Peluncuran rudal berbasis kapal selam diketahui lebih sulit untuk dideteksi sebelum lepas landas dibandingkan yang diluncurkan dari darat, sehingga menimbulkan lebih banyak ancaman keamanan.

Perkembangan dan pengujian nuklir yang dilakukan Korea Utara terus berlanjut hingga saat ini. Namun lebih daripada itu, peluncuran rudal Korea Utara

sering menargetkan titik jatuh rudal mereka di Laut Jepang, dimana tentu berbatasan langsung dengan ZEE Jepang. Meski demikian, nuklir dan rudal bukanlah satu-satunya ancaman yang diproyeksikan oleh Korea Utara walau menjadi yang paling besar di antara komponen lainnya. Sehingga demikian, Jepang tetap melakukan pengembangan pertahanan militernya sendiri, meski disatu sisi memperoleh perlindungan dari aliansi dengan Amerika Serikat. Hal ini tentu menjadi tanda tanya mengapa Jepang tetap melakukan peningkatan pertahanan militernya secara mandiri, dengan melihat ancaman-ancaman lain yang dimiliki Korea Utara.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang dibawa dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan: Bagaimana pengaruh Korea Utara terhadap peningkatan kekuatan pertahanan militer Jepang tahun 2019-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan melakukan analisis terhadap fenomena peningkatan kekuatan pertahanan yang dilakukan oleh sebuah negara.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan di balik mengapa Jepang sebagai negara yang pasifis dan mendapat perlindungan

keamanan oleh Amerika Serikat, tetap melakukan peningkatan kekuatan pertahanan secara mandiri dengan melihat ancaman-ancaman yang diproyeksikan Korea Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peningkatan kekuatan keamanan suatu negara dengan menggunakan konsep *balance of threat*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan atau melakukan perbaikan kebijakan mengenai pertahanan dan keamanan nasional, dengan melakukan pertimbangan ancaman aktual yang dihadapi.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian terkait peningkatan kekuatan pertahanan Jepang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Terdapat beberapa tinjauan literatur yang sama membahas mengenai fenomena tersebut. Dalam hal ini, literatur terdahulu menjadi acuan peneliti dan sebagai data pendukung dalam menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Jepang yang semakin meningkat.

Sebuah esai penelitian yang dilakukan oleh Manouk Driessens yang berjudul *Japanese Foreign and Security Policy: Japan's Reemergence as A Normal*

Power? menjelaskan mengenai keinginan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mengembalikan Jepang sebagai kekuatan normal. Kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang mengalami transformasi dari yang reaktif dan pasif, menjadi lebih proaktif dan independen. Dimana hal ini bisa dilihat dari Doktrin Abe yang tidak hanya berfokus dalam menjaga kekuatan ekonomi, tetapi juga menyinggung mengenai penguatan kemampuan militer dan pertahanan Jepang sendiri dan secara perlahan membatasi ketergantungan pada Amerika Serikat terkait keamanan Jepang.

Terdapat jurnal penelitian mengenai respon Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara yang ditulis oleh Sachio Nakato dengan judul *Japan's Responses to the North Korean Nuclear Crisis: Responsive Engagement Perspectives*. Jurnal ini menjelaskan menggunakan konsep keterlibatan responsif dalam menjelaskan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara. Konsep ini melihat bahwa hampir tidak mungkin bagi Jepang untuk mengembangkan nuklir selama aliansi Amerika Serikat-Jepang masih ada dan norma-norma domestik mengenai senjata nuklir masih berlaku di Jepang.

Sebuah laporan ilmiah yang ditulis oleh Yasuyo Sakata yang berjudul *North Korea: Japan's Policy Options*, menjabarkan mengenai tantangan yang dihadapi Jepang serta rekomendasi kebijakan pertahanan diri dari ancaman militer Korea Utara ke Jepang. Agresivitas Pyongyang dalam mengembangkan nuklir menyebabkan sulitnya ada dialog damai mengenai hal tersebut. Dalam rekomendasinya, Jepang harus terus mempererat kerjasama dengan Amerika

Serikat, Korea Selatan, dan Cina untuk mencegah dan membendung pengembangan nuklir Korea Utara.

Hirofumi Tosaki dalam artikel penelitiannya yang berjudul *The North Korea Nuclear Issues and Japan's Deterrence Posture* menggambarkan bahwa Jepang bisa saja menjadi target pertama ancaman dari nuklir Korea Utara sebagai konsekuensi dari *stability-instability paradox*. Sehingga, Jepang memperkuat postur pencegahannya sebagai prioritas utama. Jepang juga melakukan peningkatan aliansi bilateral dan keamanan trilateral bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Dalam artikel jurnal penelitian dengan judul *Acting on the North Korea Playbook: Japan's Responses to North Korea's Provocations* yang ditulis oleh Yasuhiro Izumikawa, menjelaskan jika Jepang mengembangkan pedomannya sendiri terkait bagaimana menanggapi provokasi Korea Utara, dengan mengupayakan peningkatan sanksi, memastikan Amerika Serikat memperluas pencegahan nuklir, dan meningkatkan kerjasama keamanan. Sayangnya, pedoman tersebut tidak mengandung hal yang mengarah pada penyelesaian ancaman nuklir Korea Utara, sehingga masih ada kemungkinan Korea Utara melakukan provokasi militer dan Jepang tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan agresi Korea Utara.

Dari kelima penelitian yang telah disebutkan tersebut, belum ada yang secara spesifik menguraikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Korea Utara menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Jepang. Empat dari lima penelitian tersebut hampir keseluruhannya berfokus pada respon dan upaya-upaya Jepang atas konflik yang terjadi dengan Korea Utara. Lalu, satu di antara penelitian tersebut juga hanya terbatas

pada Jepang yang ingin mengembangkan kekuatannya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan Amerika Serikat, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengapa hal tersebut terjadi. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis dan menjabarkan penyebab Korea Utara menjadi sebuah ancaman yang berarti bagi Jepang dengan melihat sumber-sumber ancaman yang dihasilkan oleh Korea Utara.

Penelitian ini juga akan menguraikan respon dan tindakan yang diambil oleh Jepang yang menyebabkan terjadi perubahan pada kebijakan pertahannya. Dengan melihat hasil analisis dari sumber ancaman yang dimiliki Korea Utara, penelitian ini akan menjabarkan mengenai strategi pertahanan Jepang. Dimana kebijakan keamanan Jepang akan dilihat baik dalam hal kebijakan internal maupun eksternal.

1.5.1. *Balance of Threat*

Dalam melihat peningkatan kekuatan pertahanan Jepang, peneliti menggunakan *balance of threat* sebagai konsep dasar pemikiran peneliti untuk mengetahui penyebab Jepang yang dikenal sebagai negara pasif, melakukan peningkatan terhadap kekuatan pertahanannya. Selain itu juga, di satu sisi Jepang telah mendapat jaminan perlindungan penuh dari ancaman eksternal dengan berada di bawah payung perlindungan Amerika Serikat. Maka penggunaan *balance of threat* peneliti rasa tepat untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan permasalahan tersebut.

Balance of Threat merupakan konsep yang digagas oleh Stephen M. Walt sebagai bentuk pembaharuan dari teori *Balance of Power* yang dikemukakan oleh Kenneth N. Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics*. Ketika *balance of power* melihat bahwa negara akan lebih fokus terhadap kemampuan negara lain

untuk menyeimbangkan kekuatannya, *balance of threat* memiliki pandangan tersendiri bahwa ‘kekuatan’ tidak hanya menjadi tolak ukur yang mendorong negara untuk melakukan penyeimbangan kekuatan, tetapi juga ‘ancaman’. *Balance of threat* melihat bahwa di dunia yang anarki ini, negara-negara akan membentuk aliansi sebagai respon terhadap ketidakseimbangan kekuatan yang bertujuan untuk melawan ancaman tersebut (Walt, 1987). Dengan kata lain, aliansi merupakan respon negara atas ketidakseimbangan ancaman, lebih daripada ketidakseimbangan kekuatan.

Di dalam teorinya, Walt mengkategorikan jenis-jenis aliansi yang dilakukan oleh negara-negara yang merasakan ancaman ke dalam dua kelompok: *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* didefinisikan sebagai upaya negara-negara dalam membentuk aliansi untuk mengimbangi kekuatan dari sumber yang dianggap sebagai ancaman (Walt, 1987). Keputusan dalam menggunakan *balancing* sebagai respon terhadap ancaman dimotivasi oleh dua faktor utama:

1. Sebuah negara harus menerima konsekuensi untuk dikendalikan oleh negara atau aliansi yang menjadi ancaman, jika negara tersebut tidak berhasil melakukan antisipasi terhadap hegemoni negara atau aliansi lain yang menjadi sumber ancaman tersebut. Maka dari itu, negara melakukan strategi *balancing* sebagai bentuk pencegahan dengan membentuk aliansi yang berbeda yang tidak mengancam negara tersebut.
2. Sebuah negara akan membentuk aliansi dengan negara yang dianggap lebih lemah karena dinilai tidak akan menjadi ancaman bagi negara itu sendiri, dimana hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ancaman yang mungkin

terjadi. Dengan membentuk aliansi dengan negara yang lebih lemah, negara tersebut memiliki kesempatan untuk mendominasi aliansi. Dimana hal ini dapat menjadi pengaruh bagi negara-negara lain untuk bergabung dan membuat aliansi semakin besar.

Kedua faktor inilah yang mempengaruhi keputusan negara dalam menghadapi ancaman yang ada. Negara-negara yang kuat akan cenderung melakukan *balancing* dengan negara-negara yang dianggap lemah sebagai pilihan yang menjadi upaya untuk tidak didominasi dan dapat melakukan dominasi di dalam aliansi. Sebaliknya, untuk negara-negara yang lemah melakukan *balancing* dengan negara-negara kuat yang dinilai tidak memberikan ancaman bagi mereka.

Di satu sisi, *bandwagoning* merupakan upaya yang dilakukan oleh negara-negara dalam membentuk aliansi bersama dengan negara yang menjadi sumber ancaman. Dalam *bandwagoning* juga terdapat dua faktor utama negara-negara memilih untuk melakukan *bandwagoning* sebagai respon terhadap ancaman:

1. Negara-negara memilih *bandwagoning* sebagai bentuk peredaan (*appeasement*). Dalam hal ini, negara-negara melakukan aliansi dengan negara aliansi lain yang menjadi sumber ancaman dengan maksud agar pemberi ancaman dapat mengalihkan ke pihak lain.
2. Pada masa perang, negara melakukan *bandwagoning* dengan bergabung ke negara-negara kuat karena memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dan membawa pulang rampasan perang.

Selanjutnya, Walt (1987) melakukan pemisahan *sources of threat* (sumber-sumber ancaman) yang kemudian akan berdampak pada setiap tingkat ancaman

yang akan dirasakan oleh negara, antara lain *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*.

1. *Aggregate power* menunjukkan bahwa kekuatan relatif yang dimiliki oleh suatu negara dapat memungkinkan negara tersebut untuk menjadi ancaman bagi negara lain. Kekuatan relatif disini merupakan kepemilikan sumber daya negara, yang mencakup populasi yang besar, ekonomi yang kuat, kemampuan untuk memproduksi senjata, dan teknologi canggih. Ancaman yang dihadirkan ke negara lain akan meningkat seiring dengan jumlah *aggregate power* suatu negara.
2. *Geographic proximity* yang menganggap bahwa negara dengan letak geografis yang lebih dekat memiliki potensi untuk menjadi ancaman terbesar. Dengan kata lain, kapasitas suatu negara untuk memproyeksikan kekuatannya dipengaruhi oleh jarak atau kedekatan geografis dengan negara lain.
3. *Offensive power* merupakan kemampuan negara untuk menimbulkan ancaman terhadap integritas teritorial dan kedaulatan negara lain dengan mengandalkan kekuatan ofensifnya. Dalam hal ini, *offensive power* meliputi jumlah tentara militer, kendaraan tempur, dan senjata militer—baik nuklir maupun non nuklir. Sehingga, negara-negara lain akan membentuk aliansi.
4. *Aggressive intention* dalam pandangan Walt (1987) menjelaskan bahwa *intention* (niatan) suatu negara memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana negara tersebut dipandang negara lain. Sebuah

negara akan dianggap sebagai ancaman jika negara tersebut dianggap memiliki niatan yang agresif. Ancaman yang harus dihadapi oleh negara lain akan meningkat sejalan dengan seberapa besar niat agresif suatu negara dalam bertindak.

Kemampuan suatu negara untuk benar-benar mengancam negara lain ditentukan oleh sumber-sumber ancaman atau *sources of threat*, seperti yang telah dijabarkan. Kapasitas suatu negara untuk mengancam negara lain akan mengalami peningkatan seiring dengan jumlah pemenuhan ancaman oleh negara tersebut. Dimana hal ini akan berlanjut ke arah respon negara dalam menghadapi ancaman tersebut, yaitu dengan melakukan aliansi.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Sources of Threat*

Sumber ancaman yang dihasilkan oleh sebuah negara sejalan dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh negara lainnya, yang kemudian mendorong negara-negara untuk melakukan aliansi (Walt, 1987). Dalam penjelasannya, terdapat empat pembagian sumber ancaman, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Tingkat ancaman yang dirasakan oleh negara lain akan semakin besar seiring dengan pemenuhan terhadap keempat ancaman tersebut. Maka demikian, negara-negara lainnya akan merasa terancam dengan negara tersebut, yang menjadi salah satu alasan negara membentuk aliansi merujuk dari *balance of threat*.

1.6.1.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan tujuan utama dan faktor penentu yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam menetapkan atau membentuk kebijakan luar negerinya (Morgenthau, 1952). Merujuk Hans J. Morgenthau, terdapat tiga konsep kepentingan nasional yang kemudian disebutkan sebagai berikut; (1) perlindungan terhadap identitas fisik, (2) perlindungan terhadap identitas politik, dan (3) perlindungan terhadap kulturnya. Mengacu perlindungan terhadap identitas fisik, maka negara melakukan upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah teritorialnya.

1.6.1.3. Keamanan Nasional

Keamanan nasional, secara tradisional, didefinisikan sebagai pertahanan wilayah nasional terhadap ancaman dan serangan militer negara lain, sehingga hal ini menjadi tujuan utama dari pemerintahan yang berdaulat (Amaritasari, 2015). Keamanan nasional disini mengacu pada kekuatan militer, pertahanan wilayah negara secara fisik, dan kelangsungan hidup nasional, sehingga dapat dikatakan jika fokus utama dari keamanan nasional adalah melindungi negara dari ancaman atas kepentingan nasional negara tersebut.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Sources of Threat*

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada *sources of threat* yang dimiliki Korea Utara yang mempengaruhi Jepang untuk melakukan peningkatan kekuatan pertahanannya. Adapun indikator yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah keempat dari sumber ancaman yang dikemukakan oleh Walt, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention* Korea Utara.

1.6.2.2. Kepentingan Nasional

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dengan melihat faktor yang mempengaruhi kebijakan Jepang untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. Peningkatan tersebut menjadi tanda tanya karena seharusnya Jepang adalah negara yang pasif dan Jepang sendiri telah mendapat payung perlindungan Amerika Serikat. Dalam hal ini, kepentingan nasional sangat berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menjalankan kebijakannya. Maka dari itu, peneliti perlu menggunakan indikator-indikator berikut:

- a) Apa yang ingin dicapai Jepang dengan melakukan perubahan kebijakan pertahanan;
- b) Tujuan dari kerjasama yang terjalin dengan aliansi ataupun dengan negara-negara lain.

1.6.2.3. Keamanan Nasional

Peningkatan kekuatan pertahanan Jepang tidak lepas dari keamanan nasional Jepang sendiri. Maka dari itu, peneliti juga perlu untuk melihat pada konsep keamanan nasional. Keamanan nasional yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana ancaman-ancaman yang dihasilkan Korea Utara sangat mempengaruhi keamanan nasional Jepang, padahal di satu sisi Jepang telah beraliansi dengan Amerika Serikat dengan memberikan jaminan keamanan eksternal. Adapun indikator yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Kebijakan-kebijakan pertahanan yang dijalankan Jepang atas respon terhadap ancaman Korea Utara;
- b) Kerjasama keamanan Jepang bersama dengan negara-negara lain.

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori, peneliti berargumen bahwa peningkatan kekuatan pertahanan dilatarbelakangi oleh persepsi Jepang atas ancaman rudal dan nuklir Korea Utara yang setiap tahunnya kian mengalami peningkatan. Jepang ingin membangun arsitektur pertahanannya sendiri tanpa keterlibatan penuh dari Amerika Serikat yang didasarkan pada ketidakinginan Jepang untuk menggantungkan keamanan nasionalnya secara keseluruhan kepada aliansinya tersebut. Sehingga, terjadi peningkatan terhadap kekuatan militer Jepang untuk membentuk pertahanan yang mandiri. Di samping itu, Jepang turut memperkuat jalinan aliansi dan kerjasama keamanan dengan negara lain untuk memperkuat

postur pertahanan nasionalnya dalam menghadapi ancaman-ancaman rudal dan nuklir Korea Utara.

1.8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan peningkatan kekuatan pertahanan militer Jepang, dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan *balance of threat* dan ditarik kesimpulannya sebagai jawaban dari rumusan masalah. Teori *balance of threat* digunakan sebagai pisau analisis untuk membantu menjabarkan terkait peningkatan kekuatan pertahanan Jepang.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif kualitatif dalam menjelaskan peningkatan kekuatan pertahanan Jepang. Penelitian tipe eksplanatif adalah tipe penelitian yang mencoba menjelaskan mengenai penyebab, faktor, atau hal yang mendasari terjadinya peristiwa yang diteliti.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs dari penelitian ini bertempat di Jepang, yang terletak di Asia Timur. Dengan menggunakan menggunakan metode *desk research* sebagai metode pengumpulan data yang mendukung argumen peneliti, data-data yang diperoleh sebagai penunjang penelitian tersedia di internet dan dapat diakses dari domisili peneliti.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Jepang, dimana Jepang disini sebagai negara yang pasifis, melakukan peningkatan kekuatan pertahanannya. Dalam permasalahan ini, Jepang melakukan penguatan terhadap kekuatan pertahanan, dimana di satu sisi sebenarnya Jepang berada di bawah payung perlindungan dari Amerika Serikat yang siap membantu melindungi keamanan nasional Jepang dari ancaman eksternal, salah satunya dari Korea Utara.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sendiri bersifat non numerik, sehingga tidak berupa angka-angka. Maka dari itu, data kualitatif lebih bersifat dimana data tersebut berupa kata-kata, frasa, gambar, simbol, dan atau objek yang berhubungan dengan isu yang diangkat.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder diperoleh melalui pernyataan langsung, arsip, laporan, pengumuman, dan dokumen resmi pemerintah yang didapatkan melalui laman resmi pemerintah. Selain itu, data sekunder untuk penelitian ini juga didapatkan dari penelitian, literatur terdahulu, hingga berita yang dikeluarkan oleh sumber yang kredibel.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder tersebut adalah dengan teknik *literature research* (studi kepustakaan). *Literature research* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan membaca literatur maupun dokumen tertulis lainnya yang sudah ada yang dapat

ditemukan secara fisik maupun secara daring dengan mengedepankan kredibilitas data yang disediakan, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menggunakan pendekatan kongruen untuk analisis data. Data-data yang sudah ditemukan, kemudian dijabarkan menggunakan teori dan konsep dengan menghubungkan data yang sudah tersedia untuk memperoleh hasil dari permasalahan penelitian. Hubungan kausalitas atau interaksi sebab-akibat dicoba untuk dijelaskan melalui penggunaan metodologi kongruen. Sehingga, data dapat diurutkan dan dipilih oleh peneliti sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan.

1.8.8. Kualitas Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dengan memperhatikan kredibilitas penerbit data. Semua data diambil dari pihak yang berkaitan langsung dengan peningkatan kekuatan pertahanan Jepang dan aliansinya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini juga membawa hal yang berbeda dari tinjauan pustaka sebagai rujukan penulisan ini, dimana penelitian ini memfokuskan kepada penyebab peningkatan kekuatan pertahanan Jepang padahal negara tersebut telah mendapat jaminan keamanan dari ancaman eksternal oleh Amerika Serikat dengan menggunakan teori *balance of threat*.